



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 221 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 24 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

- (3) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 196 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 221 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kerangka teknis penyusunan, Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang pada Tahun 2021. Rencana Kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.



Pada dasarnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah berisi tentang Kebijakan Umum Organisasi Perangkat Daerah, dan Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana kinerja Organisasi Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah.

Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 24 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dimaksudkan sebagai telaah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Tahap III dan merupakan transisi dari Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Tahap II.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yaitu:

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Malang kedalam rencana kegiatan Pembangunan;
2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan Program dan Kegiatan Tahunan;
3. Sebagai tolak ukur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 (n-2) Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2018 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

##### **A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 98%.
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - j. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan :
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Kegiatan :
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari -Hari Tertentu target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  4. Proram peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan :
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan melalui Kegiatan :
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kenerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  6. Program Penegakan Perundang – Undangan Daerah melalui Kegiatan :
    - b. Pencegahan Pelanggarab Perundang – Undangan Daerah target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - c. Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - d. Penindakan Pelanggaran Perundang – Undangan Daerah target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban melalui Kegiatan :
  - a. Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Pengamanan Aset target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Program Perlindungan Masyarakat melalui Kegiatan :
  - a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Pembentukan Pengamanan Swakarsa target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Pembinaan Kelompok Masyarakat target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - a. Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Penanggulangan Kebakaran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Saranan dan Prasarana target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
10. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
  - a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak diletakati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (salah pesonalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCT) target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=9	11 (10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola administrasi Keuangan (OB)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan penggandaan suku cadang yang disediakan (unit)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2019(Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=9	11 (10/4)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (OHK)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
10	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dians ke luar daerah (OHK)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
11	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (OHK)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	-	-	-	-	100%	100%	-
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	20%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 4 baru yang diadakan (Unit)	22 Unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	20%
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	890 Stel	178 Stel	178 Stel	178 Stel	178 Stel	120 Stel	120 Stel	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	890 Stel	178 Stel	178 Stel	178 Stel	178 Stel	120 Stel	120 Stel	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Penyediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2019(Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	20%
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama I dan semester II (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	20%
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	20%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20% *</b>
1.	Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	80 Kali	2 Kali	72 Kali	72 Kali	100%	96 Kegiatan	96 Kegiatan	20%
2.	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	830 Giat	168 Kegiatan	158 Kegiatan	158 Kegiatan	100%	218 Kegiatan	218 Kegiatan	20%
3.	Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	207 Kegiatan	43 Kegiatan	39 Kegiatan	39 Kegiatan	100%	50 Kegiatan	50 Kegiatan	20%
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20% *</b>
1.	Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	254 Kegiatan	48 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	48 Kegiatan	48 Kegiatan	20%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2019(Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (9)	11 (10/4)
<b>X</b>	<b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu Tidak dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20% *</b>
1	Kegiatan Pengumpulan Inforamsi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	860 Kegiatan	164 Kegiatan	164 Kegiatan	164 Kegiatan	20%	151 Kegiatan	-	- *

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.**

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah kegiatan :
  - a. Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah;
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - c. Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah.
2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban , dengan kegiatan :
  - a. Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Pengamanan Aset;
  - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Perlindungan Masyarakat melalui Kegiatan :
  - a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Pembentukan Pengamanan Swakarsa;
  - c. Pembinaan Kelompok Masyarakat.
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - a. Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2020

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang







### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.**

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Malang adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan (Luasan Wilayah);
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah:

1. Melakukan penegakan Perda dan Perkada melalui tindakan preventive, penindakan preventif non yustisial serta tindakan yustisial.
2. Melakukan patroli wilayah dalam rangka pemantauan gangguan Trantibmas dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
3. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan kecamatan perkotaan;
4. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan kecamatan pedesaan;
5. Bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam sosialisai perda / perkada;
6. Bekerjasama dengan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah lain guna menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan dan masyarakat;
7. Membuka komunikasi dan informasi dalam rangka menampung pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan / masyarakat;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Diklat Dasar bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta diklat teknis lainnya;
10. Monitoring dan evaluasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Malang tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2019, program indikatif di tahun 2020 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2020 adalah “Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur, Potensi Pariwisata Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan layanan sosial dasar berkelanjutan;
2. Penguatan potensi ekonomi daerah melalui pembangunan pertanian, Pariwisata, dan Industri kreatif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan instruktur wilayah secara berkelanjutan dalam mendukung daya saing ekonomi daerah;
4. Penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 10 program yang terdiri dari 32 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang :

Tabel 2.3  
Review Terhadap RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>20%</b>	<b>2.550.602.780</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>20%</b>	<b>2.550.602.780</b>	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	5.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	5.600.000	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kantor Satpol	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	2.333.508.000	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kantor Satpol PP	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	2.333.508.000	
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Satpol PP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan	12 Bulan	12.400.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Satpol PP	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan	12 Bulan	12.400.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	26.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	26.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Satpol PP	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	20.900.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Satpol PP	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	20.900.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	12 Bulan	6.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	12 Bulan	6.600.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Satpol PP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan (Jenis	12 Bulan	7.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Satpol PP	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan (Jenis	12 Bulan	7.200.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Satpol PP	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	46.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Satpol PP	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	46.000.000	
9	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kantor Satpol PP	Jumlah pegawai/memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	31.600.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kantor Satpol PP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	31.200.000	
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kantor Satpol PP	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	12 Bulan	54.000.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kantor Satpol PP	Jumlah pegawai memenuhi penugasan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan	53.600.000	
11	Penyedia Jasa kebersihan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	5.994.780	Penyedia Jasa kebersihan Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	5.994.780	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		<b>Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>20%</b>	<b>1.532.334.450</b>			<b>Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>		<b>1.532.334.450</b>	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Satpol PP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Tahun	109.300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Tahun	109.300.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Kantor Satpol PP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	1 Kali	23.044.450	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Satpol PP	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	1 Kali	23.044.450	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan (Unit)	3 Unit	1.400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan (Unit)	3 Unit	1.400.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase pemenuhan disiplin aparatur</b>	<b>20%</b>	<b>97.900.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase pemenuhan disiplin aparatur</b>	<b>20%</b>	<b>97.900.000</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	1 kali kegiatan	73.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	1 kali kegiatan	73.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	1 Kali Kegiatan	24.900.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Kantor Satpol PP	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	1 Kali Kegiatan	24.900.000	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>20%</b>	<b>171.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>20%</b>	<b>171.000.000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Satpol PP	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	11 Orang	171.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Satpol PP	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	11 Orang	171.000.000	
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Terwujutnya Capaian Laporan Kinerja</b>	<b>20%</b>	<b>18.805.600</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Terwujutnya Capaian Laporan Kinerja</b>	<b>20%</b>	<b>18.805.600</b>	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	1 Dokumen	7.140.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)		7.140.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Dokumen	5.832.800	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Dokumen	5.832.800	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dokumen	5.832.800	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Satpol PP	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dokumen	5.832.800	
<b>VI</b>	<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</b>		<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>	<b>20%</b>	<b>284.600.000</b>	<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</b>		<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>	<b>20%</b>	<b>284.600.000</b>	
1	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec.	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	72 Giat	11.700.000	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kecamatan	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	96 Giat	11.700.000	
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	33 Kec.	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	158 Giat	247.400.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	33 Kecamatan	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	107 Giat	247.400.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
2	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec.	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	42 Giat	25.500.000	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec.	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	42 Giat	25.500.000	
<b>VII</b>	<b>Program Pemeliharaan dan Ketertiban</b>		<b>Persentase Pemeliharaan dan Ketertiban</b>	<b>20%</b>	<b>854.400.000</b>	<b>Program Pemeliharaan dan Ketertiban</b>	33 Kec.	<b>Persentase Pemeliharaan dan Ketertiban</b>	<b>20%</b>	<b>854.400.000</b>	
1	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban	48 Giat	305.100.000	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban	48 Giat	305.100.000	
2	Kegiatan Pengamanan Aset	Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati/Waki 1 Bupati	Jumlah Pengamanan Aset	365 hari	301.000.000	Kegiatan Pengamanan Aset	Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati/Waki 1 Bupati	Jumlah Pengamanan Aset	365 hari	301.000.000	
3	Kegiatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	33 Kec.	Jumlah Patroli dalam rangka Ketertiban Umum	46 Giat	248.300.000	Kegiatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	33 Kec.	Jumlah Patroli dalam rangka Ketertiban Umum	46 Giat	248.300.000	



No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
VIII	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	33 Kec.	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>	20%	<b>1.580.200.000</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	33 Kec.	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>	20%	<b>1.580.200.000</b>	
1	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	35 Giat	1.331.200.000	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	35 Giat	1.331.200.000	
2	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	12 Giat	112.000.000	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	12 Giat	112.000.000	
3	Pembinaan Kelompok Masyarakat	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	11 Giat	137.000.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat	33 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	11 Giat	137.000.000	
VIII	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>20%</b>	<b>551.336.000</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>20%</b>	<b>551.336.000</b>	
1	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	33 Kec.	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	4 kali	27.880.000	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	33 Kec.	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	4 kali	27.880.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
2	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	33 Kec.	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	60 Kali	297.750.000	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	33 Kec.	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	60 Kali	297.750.000	
3	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	33 Kec.	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	24 kali	225.706.000		33 Kec.	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	24 kali	225.706.000	
<b>IX</b>	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>33 Kec</b>	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>33 Kec</b>	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
1	Kegiatan Pengumpulan Informasi tentang adanya peredaran rokok yang dilekati pitacukai palsu /tidak dilekati pita cukai	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	151 Giat	500.000.000	Kegiatan Pengumpulan Informasi tentang adanya peredaran rokok yang dilekati pitacukai palsu /tidak dilekati pita cukai	33 Kec.	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	151 Giat	500.000.000	
<b>Jumlah</b>					<b>8.141.188.830</b>					<b>8.141.188.830</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pembahasan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tidak terdapat usulan atau nihil.

Tabel 2.4  
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
N I H I L					

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN MALANG**

**1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan Operasional bersama dinas Sosial dalam rangka penanganan anak jalanan (anjali), gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan wanita tuna susila (WTS) dan kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat (pelatihan terhadap Linmas Kecamatan) tetapi dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih mengalami kendala yaitu masih minimnya Linmas Perempuan yang ada di Kecamatan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai OPD yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala

Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mendukung prioritas pembangunan nasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan pelayanan pada 2 (dua) cakupan, yaitu :

1. Perlindungan Masyarakat; dan
2. Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

## **1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka mendukung **Misi I : “ Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supermasi hukum”**, maka tujuan pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah;
2. Meningkatkan pengendalian penggunaan cukai ilegal;
3. Memantapkan pola koordinasi dan kerjasama antar aparat keamanan dan masyarakat;
4. Mengoptimalkan peran masyarakat dibidang keamanan lingkungan;
5. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam;
6. Kesiagaan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
7. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

Sedangkan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. Berkurangnya penggunaan cukai ilegal;
3. Terwujudnya Pokja koordinasi dan kerjasama yang mantab dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
5. Tertanganinya pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam meningkatkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka mendukung Kabupaten Malang yang aman dan tertib di tahun 2020 mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
  - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Harian Khusus Hari – Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhirtahun.
6. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah kegiatan :
  - Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah;

- Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah.
7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban , dengan kegiatan :
- Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
  - Pengamanan Aset;
  - Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Program Perlindungan Masyarakat melalui Kegiatan :
- Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - Pembentukan Pengamanan Swakarsa;
  - Pembinaan Kelompok Masyarakat.
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - Penanggulangan Kebakaran;
  - Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
10. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Dari uraian program dan kegiatan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang diatas selama ini hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang kedepan ingin di setiap kecamatan memiliki jumlah Linmas Perempuan yang sama dengan jumlah Linmas laki-laki yang ada saat ini, dan disetiap Program dan Kegiatan mengaju pada Pengarusutamaan Gender sehingga mendorong peningkatan pembangunan Pemerintah Kabupaten dalam kualitas sumber daya manusia sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Development Goals, Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sehubungan dengan uraian diatas maka Rencana Kerja dan Pendanaan dapat kami simpulkan pada tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dibawah ini

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Programdan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	01	05	2	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							<b>4.418.200.000</b>	APBD			<b>4.468.520.000</b>	
1	01	05	2	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	5.600.000	APBD		12 Bulan			6.160.000		
1	01	05	2	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	4.234.000.000	APBD		12 Bulan			4.657.400.000		
1	01	05	2	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	12.600.000	APBD		12 Bulan			13.860.000		
1	01	05	2	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	26.000.000	APBD		12 Bulan			28.600.000		
1	01	05	2	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	20.900.000	APBD		12 Bulan			22.990.000		
1	01	05	2	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kantor Satpol	12 Bulan	7.600.000	APBD		12 Bulan			8.360.000		
1	01	05	2	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	7.600.000	APBD		1 Paket			8.360.000		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	01	05	2	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	46.400.000	APBD		12 Bulan	51.040.000	
1	01	05	2	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	72.300.000	APBD		12 Bulan	79.530.0000	
1	01	05	2	01	19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	94.200.000	APBD		12 Bulan	103.620.000	
1	01	05	2	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		<b>20%</b>	<b>132.344.450</b>	APBD			<b>145.578.895</b>	
1	01	05	2	14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor Satpol PP	1 Kali	23.044.450	APBD		1 Kali	25.348.895	
1	01	05	2	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kantor Satpol PP	1 Tahun	109.300.000	APBD		1 Tahun	120.230.000	
1	01	05	2	.....		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	Kantor Satpol PP	6 Unit	0	APBD		0 Unit	0	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	01	05	2	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>20%</b>	<b>155.100.000</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>155.100.000</b>	
1	01	05	2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kantor Satpol PP	1 Kali Kegiatan	98.900.000	APBD		1 Kali Kegiatan	98.900.000	
1	01	05	2	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kantor Satpol PP	1 Kali Kegiatan	55.200.000	APBD		1 Kali Kegiatan	55.200.000	
						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>20%</b>	<b>18.805.600</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>20.686.160</b>	
1	01	05	2	05		19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kantor Satpol PP	2 Unit	7.140.000	APBD		2 Unit	7.854.000	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	01	05	2	05	01		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kantor Satpol PP	1 Unit	5.832.800	APBD		1 Unit	6.416.080	
1	01	05	2	05	02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kantor Satpol PP	1 Unit	5.832.800	APBD		1 Unit	6.416.080	
							<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>171.000.000</b>			<b>205</b>	<b>188.100.000</b>	
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)		11 orang	171.000.000	APBD		11 orang	188.100.000	
1	01	05	2	10			<b>Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>		<b>20%</b>	<b>557.701.600</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>613.471.760</b>	
1	01	05	2	10	01		Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	96 Kali Kegiatan	108.397.600	APBD		96 Kali Kegiatan	119.237.360	
1	01	05	2	10	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	107 Kali Kegiatan	389.681.000	APBD		107 Kali Kegiatan	428.649.100	
1	01	05	2	10	02		Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	50 Kali Kegiatan	59.623.000	APBD		50 Kali Kegiatan	65.585.300	
1	01	05	2	11			<b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>		<b>20%</b>	<b>854.400.000</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>1.163.310.000</b>	
1	01	05	2	11	01		Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	33 Kec	48 Giat	305.100.000	APBD		48 Giat	335.610.000	
1	01	05	2	11	02		Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	Lingkungan Kantor, Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati Malang	365 Hari	301.000.000	APBD		365 Hari	331.100.000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
						Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum	33 Kec	46 Giat	248.300.000	APBD		46 Giat	496.600.000	Mengakumulir PUG
1	01	05	2	12		<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>		<b>3%</b>	<b>1.580.200.000</b>	<b>APBD</b>		<b>3%</b>	<b>1.580.200.000</b>	
1	01	05	2	12	01	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas	33 Kec	35 Giat	1.331.200.000	APBD		35 Giat	1.331.200.000	Mengakumulir PUG
1	01	05	2	12	02	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	33 Kec	12 Giat	112.000.000	APBD		12 Giat	112.000.000	
1	01	05	2	12	03	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	33 Kec	11 Giat	137.000.000	APBD		11 Giat	137.000.000	
1	01	05	2	13		<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>20%</b>	<b>1.551.336.000</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	<b>1.706.469.600</b>	
1	01	05	2	13	01	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	33 Kec	16 Kali	527.880.000	APBD		16 Kali	580.668.000	
1	01	05	2	13	02	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	33 Kec	0	297.750.000	APBD		0	327.525.000	
1	01	05	2	13	03	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan	33 Kec	24 Kali	725.706.000	APBD		24 Kali	798.276.600	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
						Kebakaran	Pemeliharaan Sarpras Damkar								
1	01	05	2	14		<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b>		20%	500.000.000	DBHCHT		20%	500.000.000	
1	01	05	2	14	01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai,	33 Kec	151 Giat	500.000.000	DBHCHT		151 Giat	500.000.000	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
								Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi),Dile kati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran								
<b>Jumlah</b>											<b>9.531.587.650</b>				<b>10.964.836.415</b>	



Tabel 4.1  
Rencana Kerja Pendanaan Tahun 2020  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	01	05	2	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>4.418.200.000</b>	APBD	
1	01	05	2	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	5.600.000	APBD	
1	01	05	2	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	4.234.000.000	APBD	
1	01	05	2	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	12.600.000	APBD	
1	01	05	2	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	26.000.000	APBD	
1	01	05	2	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	20.900.000	APBD	
1	01	05	2	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kantor Satpol	12 Bulan	7.600.000	APBD	
1	01	05	2	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	7.600.000	APBD	
1	01	05	2	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	46.400.000	APBD	
1	01	05	2	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	72.300.000	APBD	
1	01	05	2	01	19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kantor Satpol PP	12 Bulan	94.200.000	APBD	
1	01	05	2	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		<b>20%</b>	<b>132.344.450</b>	APBD	
1	01	05	2	14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor Satpol PP	1 Kali	23.044.450	APBD	
1	01	05	2	16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kantor Satpol PP	1 Tahun	109.300.000	APBD	
1	01	05	2	.....		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	Kantor Satpol PP	6 Unit	0	APBD	
1	01	05	2	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>20%</b>	<b>155.100.000</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kantor Satpol PP	1 Kali Kegiatan	98.900.000	APBD	
1	01	05	2	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kantor Satpol PP	1 Kali Kegiatan	55.200.000	APBD	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020			Catatan Penting	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
							<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>20%</b>	<b>18.805.600</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	05			19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kantor Satpol PP	2 Unit	7.140.000	APBD	
1	01	05	2	05	01		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kantor Satpol PP	1 Unit	5.832.800	APBD	
1	01	05	2	05	02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kantor Satpol PP	1 Unit	5.832.800	APBD	
							<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>171.000.000</b>		
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)		11 orang	171.000.000	APBD	
1	01	05	2	10			<b>Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>		<b>20%</b>	<b>557.701.600</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	10	01		Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	96 Kali Kegiatan	108.397.600	APBD	
1	01	05	2	10	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	107 Kali Kegiatan	389.681.000	APBD	
1	01	05	2	10	02		Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	33 Kec	50 Kali Kegiatan	59.623.000	APBD	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>		<b>20%</b>	<b>854.400.000</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	11	01		Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	33 Kec	48 Giat	305.100.000	APBD	
1	01	05	2	11	02		Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	Lingkungan Kantor, Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati Malang	365 Hari	301.000.000	APBD	
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum	33 Kec	46 Giat	248.300.000	APBD	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020			Catatan Penting	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	01	05	2	12		<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>		<b>3%</b>	<b>1.580.200.000</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	12	01	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas	33 Kec	35 Giat	1.331.200.000	APBD	
1	01	05	2	12	02	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	33 Kec	12 Giat	112.000.000	APBD	
1	01	05	2	12	03	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	33 Kec	11 Giat	137.000.000	APBD	
1	01	05	2	13		<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>20%</b>	<b>1.551.336.000</b>	<b>APBD</b>	
1	01	05	2	13	01	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	33 Kec	16 Kali	527.880.000	APBD	
1	01	05	2	13	02	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	33 Kec	0	297.750.000	APBD	
1	01	05	2	13	03	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan	33 Kec	24 Kali	725.706.000	APBD	
1	01	05	2	14		<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b>		<b>20%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>DBHCHT</b>	
1	01	05	2	14	01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi),Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	33 Kec	151 Giat	500.000.000	DBHCHT	
<b>Jumlah</b>										<b>9.531.587.650</b>		

Tabel 4.2  
Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Ket.
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	<b>Satuan Polisi pamong Praja</b>								
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20%</b>	<b>4.418.200.000</b>					
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	5.600.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	4.234.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	12 Bulan	12.600.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	26.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	20.900.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Bulan	7.600.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Bulan	7.600.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	46.400.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	72.300.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	94.200.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>20%</b>	<b>132.344.450</b>					
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Kali	23.044.450	15 %	35 %	35 %	15 %	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	1 Tahun	109.300.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
2.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	0	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatr (%)</b>	<b>20%</b>	<b>155.100.000</b>					
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1 Kali Kegiatan	98.900.000	-	100 %	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Ket.
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1 Kali Kegiatan	55.200.000	-	100 %	-	-	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>20%</b>	<b>18.805.600</b>					
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Unit	7.140.000	-	-	-	100 %	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Unit	5.832.800	-	-	-	100 %	
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Unit	5.832.800	-	-	-	100 %	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20%</b>	<b>171.000.000</b>					
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 orang	171.000.000	-	50 %	50 %	-	
<b>6</b>	<b>Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>	<b>20%</b>	<b>557.701.600</b>					
6.1	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	96 Kali Kegiatan	108.397.600	15 %	35 %	35 %	15 %	
6.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	107 Kali Kegiatan	389.681.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
6.3	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	50 Kali Kegiatan	59.623.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>7</b>	<b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>	<b>20%</b>	<b>854.400.000</b>					
7.1	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	48 Giat	305.100.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
7.2	Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	365 Hari	301.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
7.3	Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum	46 Giat	248.300.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>8</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>	<b>3%</b>	<b>1.580.200.000</b>					
8.1	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas	35 Giat	1.331.200.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
8.2	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	12 Giat	112.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
8.3	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	11 Giat	137.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>20%</b>	<b>1.551.336.000</b>					
9.1	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	16 Kali	527.880.000	15 %	35 %	35 %	15 %	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
9.2	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	60 Kali	297.750.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
9.3	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan	24 Kali	725.706.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>10</b>	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b>	<b>20%</b>	<b>500.000.000</b>					
10.1	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi),Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	151 Giat	500.000.000	15 %	35 %	35 %	15 %	
<b>Jumlah</b>					<b>9.531.587.650</b>				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 ini, ada beberapa kegiatan yang anggaran belanjanya ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap penting sehubungan dengan peningkatan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pencegahan, dan penanggulangan kebakaran.

Didalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan satuan anggaran yang tersedia serta aturan-aturan yang berlaku atau berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2021 ini dibuat untuk bisa dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Atas saran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**